Dinamika Konflik Anti-Extradition Law Amendment Bill (ELAB) di Hong Kong Tahun 2019

Amelia Febrianti Soehartono¹, Mely Noviryan²
Universitas Brawijaya

ABSTRACT

The Conflict of Anti-Extradition Law Amendment Bill (ELAB) in Hong Kong did not appear out of thin air. It was instigated by a Pro-Democracy group to challenge the amendment bill proposed by the government. The conflict escalated when other internal and external actors like the United States expressed their support for the Pro-Democracy group to fight against the Amendment Bill. Using the conflict dynamics approach to examine the process of ELAB conflict, this article analyzes the process through three elements that include internal actors, external parties, and clashes between the Chinese and Hong Kongese in terms of their sociopolitical values. Finally, this research shows that the Hong Kong ELAB conflict had escalated and intensified even more due to the dynamics between these three elements.

Keywords: Conflict Dynamics, Conflict Escalation, ELAB, Hong Kong

PENDAHULUAN

Hong Kong yang merupakan bagian wilayah dari China yang saat ini sedang mengalami demonstrasi besar-besaran. Protes yang dilakukan oleh masyarakat Hong Kong ini juga dikenal sebagai konflik *Anti-Extradition Law Amendment Bill* (ELAB) adalah serangkaian demonstrasi yang sedang berlangsung di Hong Kong. Aksi protes ini dimulai dengan tujuan untuk menentang diperkenalkannya RUU amandemen Pelanggar yang diusulkan oleh Pemerintah Hong Kong. Pemberlakuan RUU ini akan membuat pemerintah daerah menahan dan mengekstradisi para pelaku kriminal yang terdapat di beberapa wilayah, sedangkan Hong Kong sendiri tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Taiwan dan China di daratan. Masyarakat Hong Kong sendiri khawatir dengan diberlakukannya RUU ini akan membatasi yurisdiksi dari penduduk maupun pendatang di Hong Kong, hal tersebut juga dapat mengganggu otonomi daerah dan kebebasan sipil (Cheung & Hughes, 2019).

Dengan terjadinya konflik ini, hal tersebut merupakan kembalinya reformasi demokrasi yang telah berhenti sejak Revolusi Payung 2014. Pemerintah pusat Tiongkok menggambarkan protes itu sebagai "krisis terburuk di Hong Kong" sejak penyerahan tahun 1997 (Cheung & Hughes, 2019). Pelanggar Pelarian dan Bantuan Hukum Reksa dalam Legislasi Pidana (*Amendment*) Bill 2019 pertama kali diusulkan oleh pemerintah Hong Kong pada Februari 2019 sebagai tanggapan atas pembunuhan 2018 Poon Hiu-wing oleh pacarnya Chan Tong-kai di Taiwan, di mana dua warga Hong Kong berkunjung sebagai turis. Karena tidak ada perjanjian ekstradisi dengan Taiwan (karena pemerintah China tidak mengakui kedaulatannya), pemerintah Hong Kong mengusulkan amandemen Ordo Pelanggar Pelarian (Cap. 503) dan Bantuan Hukum Saling Gotong Royong dalam Undang-Undang Pidana (Cap. 525) untuk menetapkan mekanisme transfer kasus per kasus buron, atas perintah Ketua Eksekutif, ke yurisdiksi mana pun yang kota ini tidak memiliki perjanjian ekstradisi formal. Salah satu yurisdiksi semacam itu adalah China daratan. Dimasukkannya daratan China dalam amandemen tersebut menjadi perhatian berbagai sektor masyarakat Hong Kong. Pendukung Pro-Demokrasi khawatir akan dihapusnya pemisahan wilayah hukum dari hukum China

daratan yang dikelola oleh Partai Komunis, sehingga mengikis prinsip "satu negara, dua sistem" dalam praktik sejak penyerahan tahun 1997. Penentang RUU itu mendesak pemerintah Hong Kong untuk mengeksplorasi jalan lain, seperti membangun pengaturan ekstradisi semata-mata dengan Taiwan, dan untuk membatalkan pengaturan segera setelah penyerahan tersangka (Leung, 2019). Konflik yang terjadi di Hong Kong tahun 2019 ini datang pada empat setengah tahun setelah Revolusi Payung pada 2014 yang dimulai setelah Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional mengeluarkan keputusan mengenai usulan reformasi untuk sistem pemilihan Hong Kong yang sebagian besar dipandang sebagai bersifat membatasi. Namun, meskipun ada aksi massa, pemerintah tidak membuat konsesi dan gerakan berakhir dengan kegagalan. Sejak itu, tidak ada kemajuan dalam mencapai hak pilih universal universal; hanya setengah dari kursi di Dewan Legislatif yang tetap dipilih secara langsung, dan Ketua Eksekutif Hong Kong terus dipilih oleh Komite Pemilihan lingkaran kecil.

Selain itu, media seperti BBC berpendapat bahwa aksi protes yang terjadi di Hong Kong saat ini disebut sebagai aksi protes terbesar yang terjadi di Hong Kong (BBC News, 2019f). Di mana aksi protes pada tahun 2019 didorong oleh rasa putus asa daripada harapan, dan bahwa tujuan protes telah berkembang dari menarik RUU menjadi berjuang untuk kebebasan dan kebebasan yang lebih besar (Chan, 2019). Menyusul protes yang gagal, penahanan di tahun 2017 terhadap aktivis demokrasi Hong Kong semakin menghancurkan harapan kota untuk memajukan pembangunan demokrasi. Orang-orang mulai takut kehilangan "otonomi tingkat tinggi" yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Hong Kong, karena pemerintah Republik Rakyat China tampaknya semakin dan secara terus-menerus mencampuri urusan Hong Kong. Khususnya, kontroversi pengambilan sumpah Dewan Legislatif Hong Kong berakhir dengan diskualifikasi enam anggota parlemen menyusul putusan pengadilan di China Daratan; Hilangnya Causeway Bay Books memicu kekhawatiran akan rendisi yang disetujui negara dan penahanan di luar proses hukum (Leung, 2019).

Kelompok Pro-Demokrasi awalnya hanya menuntut penarikan RUU ekstradisi. Menyusul peningkatan dalam parahnya taktik pemolisian terhadap demonstran pada 12 Juni 2019 dan penangguhan rancangan undang-undang pada 15 Juni 2019, tujuan para pemrotes adalah mencapai lima tuntutan ini: (1) Penarikan lengkap tagihan ekstradisi dari proses legislatif. Meskipun Kepala Eksekutif mengumumkan penangguhan RUU yang tidak terbatas pada 15 Juni, membaca tentang itu dapat dengan cepat dilanjutkan. RUU itu "menunggu dimulainya pembacaan kedua" di Dewan Legislatif. Pada 4 September, Carrie Lam mengumumkan bahwa penarikan resmi RUU itu akan diproses oleh Sekretaris Keamanan John Lee di Dewan Legislatif nanti. (2) Pencabutan karakterisasi "kerusuhan": Pemerintah awalnya mencirikan protes 12 Juni sebagai "kerusuhan". Kemudian uraian tersebut diubah untuk mengatakan ada "beberapa" kelompok Pro-Demokrasi yang melakukan kerusuhan. Namun, para pemrotes menentang keberadaan aksi kerusuhan selama protes 12 Juni. (3) Pembebasan dan pembebasan para demonstran yang ditangkap: Para kelompok Pro-Demokrasi menganggap penangkapan itu bermotivasi politik; mereka juga mempertanyakan legitimasi polisi menangkap demonstran di rumah sakit melalui akses ke data medis rahasia mereka yang melanggar privasi pasien. (4) Pembentukan komisi penyelidikan independen tentang perilaku polisi dan penggunaan kekuatan selama protes: Kelompok sipil merasa bahwa tingkat kekerasan yang digunakan oleh polisi pada 12 Juni, khususnya mereka yang menentang para kelompok Pro-Demokrasi yang tidak melakukan pelanggaran ketika mereka ditetapkan, tidak dapat dibenarkan; Polisi yang melakukan *stop-and-search* ke banyak orang yang lewat di dekat lokasi protes tanpa kemungkinan penyebab juga dianggap kasar. (5) Pengunduran diri Carrie Lam dan pelaksanaan pemilihan umum universal untuk Dewan Legislatif dan pemilihan Ketua Eksekutif (T.-K. Wong, 2019).

Saat ini, Ketua Eksekutif dipilih oleh 1.200 anggota Komite Pemilihan, dan 35 dari 70 kursi Dewan Legislatif diisi oleh pemilih terbatas yang mewakili berbagai sektor ekonomi, membentuk mayoritas konstituen fungsional (T.-K. Wong, 2019). Protes 2019 yang terjadi di Hong Kong ini lebih memilih untuk memainkan peran pendukung, seperti melamar *Letters of No* keberatan dari polisi atau menengahi konflik antara Pro-Demokrasi dan petugas polisi (Cheng, 2019d). Kelompok Pro-Demokrasi biasanya menggunakan LIHKG, sebuah forum *online* yang mirip dengan Reddit, dan Telegram, sebuah layanan pesan terenkripsi *end-to-end* opsional mirip dengan Whatsapp, untuk berkomunikasi dan bertukar pikiran ide-ide untuk protes dan membuat keputusan bersama (Cheng, 2019c). Kelompok Pro-Demokrasi juga mendukung beberapa model dari aksi yang digunakan. Yang pertama adalah "*be water*", yang berasal dari filosofi Bruce Lee (Zhou & Wong, 2019). Para kelompok Pro-Demokrasi sering bergerak dengan cara yang gesit dan gesit sehingga polisi merasa lebih sulit untuk merespons. Kelompok Pro-Demokrasi sering mundur ketika polisi datang, meskipun mereka akan muncul kembali di tempat lain. Tidak seperti protes sebelumnya, protes 2019 didiversifikasi ke lebih dari 20 lingkungan yang berbeda di seluruh Pulau Hong Kong, Kowloon dan Wilayah Baru menyaksikan protes. Selain itu, kelompok Pro-Demokrasi juga mengadopsi metode blok hitam. Mereka kebanyakan menggunakan topeng wajah hitam untuk melindungi identitas mereka. Lebih jauh, Pro-Demokrasi menggunakan berbagai metode untuk melawan kekuatan polisi. Mereka menggunakan laser untuk mengalihkan perhatian polisi, menyemprotkan cat pada kamera pengintai, dan payung terbuka untuk melindungi dan menyembunyikan identitas kelompok dalam aksi (Yiu-man, 2019).

Beberapa dari mereka yang tergabung dalam kelompok Pro-Demokrasi juga melakukan aksi pemogokan untuk memaksa pemerintah dalam menanggapi tuntutan publik (Cheng, 2019b). Selain itu juga mereka melakukan aksi membentuk rantai manusia, memulai kampanye petisi, melakukan pemogokan umum, menghambat layanan transportasi umum, melancarkan boikot terhadap toko-toko dan organisasi pro-Beijing, menciptakan karya turunan yang mengejek polisi dan pemerintah, dan menetapkan Lennon Walls di berbagai distrik dan lingkungan di Hong Kong. Hal tersebut membuat Lennon Walls sebagai fenomena di seluruh kota setelah sebulan pergolakan politik terjadi dengan memberikan ribuan pesan yang dilontarkan seperti "*No China Extradition*" yang ditulis dalam memo warna-warni (Cheng & Chan, 2019).

Di sisi lain, kelompok Pro-Demokrasi yang lebih radikal berhadapan dengan polisi, mengepung kantor polisi, membuat penghalang jalan, dan kadang-kadang melakukan perusakan yang melemahkan simbol-simbol yang mewakili Tiongkok, dan melakukan pembakaran (Agencies, 2019). Beberapa kelompok Pro-Demokrasi juga melakukan *cyberbullied* kepada petugas polisi dan keluarga mereka dan mengunggah informasi pribadi mereka secara *online*. Meskipun demikian, terlepas dari perbedaan metode, kedua kelompok telah menahan diri untuk tidak mencela atau mengkritik yang lain. Prinsipnya adalah praksis "*Do Not Split*", yang bertujuan untuk mempromosikan rasa saling menghormati untuk pandangan yang berbeda dalam gerakan protes yang sama (Agencies, 2019).

Konflik yang ada di Hong Kong ini mengalami eskalasi yang cukup signifikan dan dalam waktu yang singkat terdapat pertambahan jumlah aktor yang terlibat dalam konflik di Hong Kong ini yang diawali dengan adanya beberapa kelompok hingga melibatkan seluruh masyarakat Hong Kong untuk menolak pengesahan dari RUU Ekstradisi yang telah diusulkan oleh Kepala Eksekutif Carrie Lam. Pada bulan Maret jumlah dari kelompok Pro-Demokrasi terdapat 12.000 orang yang tergabung dan mengalami peningkatan pada bulan April hingga 13.000 (Lok-Kei & Kang-chung, 2019). Lalu pada 3 September 2019 juga mengalami peningkatan yaitu terdapat 1.7 juta orang yang berpartisipasi dalam aksi protes tersebut, polisi mengatakan terdapat 128.000 orang berada di Victoria Park pada puncaknya.

(Su & Ho Kilpatrick, 2019). Semakin bertambahnya jumlah demonstran yang terlibat dalam konflik ini menyebabkan beberapa individu di dalamnya menjadi korban jiwa pada konflik tersebut. Menurut Kompas.com terdapat kelompok pro-demokrasi yang menjadi korban jiwa guna menghindari penangkapan yang dilakukan oleh para polisi setelah mereka melakukan pemasangan spanduk (Vidya, 2019b).

Selain dapat menimbulkan korban jiwa, rupanya konflik ini juga memberikan dampak pada perluasan wilayah untuk dijadikan sebagai titik protes mereka, yang mana awalnya hanya dilakukan di Central Causeway Bay namun setiap minggunya mereka akan melakukan perluasan wilayah untuk dijadikan titik protes mereka seperti di daerah Tsim Sha Tsui, Thung Chung, dan lain-lain (Grundy, 2019). Dan yang terakhir konflik ini dapat dikatakan sudah tereskalasi karena sudah memasuki tahap perusakan bangunan yang cukup parah dimulai dengan melakukan perusakan terhadap stasiun bawah tanah. Terdapat empat stasiun MTR - Pangeran Edward, Mong Kok, Sha Tin, dan Tseung Kwan O - di seluruh kota ditutup setelah kelompok Pro-Demokrasi membanjiri *concourses*, merusak mesin tiket, pintu putar, dan merusak stasiun (The Straits Times, 2019c). Selain itu para demonstran juga melakukan beberapa penyerangan terhadap gedung legislatif dan demo seketika berubah menjadi anarkis. mereka melakukan beberapa penghancuran terhadap jendela-jendela gedung pemerintah kota dan menutupi dinding-dinding dengan mural (Sebayang, 2019c).

Ada beberapa kerusakan lainnya yang dilakukan oleh demonstran seperti melakukan perusakan pada beberapa fasilitas dan peralatan di MTR Station Central seperti menghancurkan jendela-jendela MTR, depot-depot serta melakukan pembakaran terhadap pintu masuk MTR Station (Sebayang, 2019a). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana dinamika konflik *Anti-Extradition Law Amendment Bill* (ELAB) di Hong Kong dan untuk menjelaskan dinamika konflik *Anti-Extradition Law Amendment Bill* (ELAB) di Hong Kong yang memiliki pengaruh pada eskalasi konflik tersebut.

KERANGKA PEMIKIRAN

Konflik adalah suatu hal yang tidak akan jauh dan sulit untuk dihindari dari kehidupan manusia serta tidak akan pernah berakhir (Jeong, 2008). Konflik muncul karena tidak adanya keselarasan dan kesenjangan antar aktor/kelompok. Selain itu, konflik juga dapat muncul karena adanya ketidakpuasan dan susahnyanya dalam manajemen hubungan sehingga terciptanya gejolak antar kelompok/aktor (Jeong, 2008). Kehadiran konflik sering terjadi pada lingkungan elite-elite atau politik, misalnya pada budaya atau perbedaan identitas. (Jeong, 2008).

Menurut Ho-Won Jeong, suatu konflik akan terus berkembang jika seorang individu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan atau sikap dari individu tersebut susah untuk dikontrol. Sedangkan menurut Bartos, konflik adalah situasi yang diciptakan secara sengaja oleh seorang individu untuk kepentingan yang tidak sejalan dan untuk mengekspresikan bentuk perlawanannya pada pihak lawan (Bartos & Wehr, 2002).

Dinamika konflik terdiri dari kemunculan, keberadaan, dan transformasi yang dapat diungkapkan oleh suatu teori sistem umum yang berguna untuk menerangi beberapa elemen yang diarahkan untuk mempertahankan atau mengganggu keadaan tetap serta hubungan yang ada pada lingkungan Internal maupun Eksternal (Jeong, 2008). Dinamika konflik akan terus berkembang ketika kedua aktor mulai kehilangan keseimbangan dan kontrolnya sehingga dapat merusak pola konflik itu sendiri dengan mengubah cara interaksi antar aktor (Jeong, 2008) Ho-Won Jeong mengatakan bahwa eskalasi konflik dapat dilihat dengan adanya peningkatan terdapat intensitas tingkat permusuhan antar kedua aktor sehingga akan mendorong keduanya untuk menggunakan taktik yang cukup keras. Dengan peningkatan eskalasi suatu konflik akan membuat ruang lingkup konflik lebih luas dan secara otomatis

akan melibatkan lebih banyak orang untuk terlibat dalam situasi konflik tersebut (Jeong, 2008).

Gambar 1. Level Dinamika Konflik

Sumber: (Jeong, 2008)

Dari bagan di atas, dinamika konflik memiliki 3 variabel yang saling berkaitan satu dengan yang lain yakni 1) Perubahan Internal 2) Pengaruh eksternal dan yang terakhir 3) Kompleksitas antar 2 aktor (Jeong, 2008). Perubahan internal adalah kondisi yang terjadi pada diri individu sendiri sehingga dapat mempengaruhi dinamika di antara para aktor yang bertikai. Selain itu, pengaruh eksternal kepada perubahan internal akan memberikan dinamika kepada sebuah situasi konflik apabila kedua belah mendapatkan sebuah dukungan berbentuk ekonomi maupun militer. Selain itu, pihak eksternal dapat memberikan bantuannya berupa kekuatan pasukan ketika kedua aktor mulai kehabisan semangat dan kekurangan aktor dalam kelompoknya sehingga dapat menyeimbangkan kekuatannya dengan pihak lawan. Dan yang terakhir kompleksitas antar 2 aktor adalah keadaan yang kompleks di dalam hubungan antar kelompok dari mulai hingga berjalannya suatu konflik tersebut. Jika Jeong mengatakan bahwa pemetaan konflik di atas memiliki tujuan sebagai penyedia sistem yang berguna untuk menggambarkan ruang lingkup konflik dengan menilai tujuan para pihak, jenis hubungan mereka, dan masalah-masalah yang ada dalam sebuah pertikaian (Jeong, 2008). Selain itu, pemetaan konflik ini dapat digunakan untuk membantu pihak lawan dalam membedakan posisi mereka berawal dari kebutuhan dan minat yang sebenarnya.

Dalam pemetaan konflik milik Ho-Won Jeong, 9 elemen diantaranya yakni aktor, kebutuhan, tujuan, isu, kepentingan, nilai, strategi, *style* dan strategi intervensi (Jeong, 2008). Sembilan elemen tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menilai pelaku pada konflik utama sehingga dapat digunakan untuk mengurangi kompleksitas konflik dan memudahkan penulis dalam menganalisis situasi konflik serta perubahan yang terjadi dan pada akhirnya dapat merumuskan sebuah resolusi konflik yang dibutuhkan. Berikut merupakan bagan analisa konflik dari Ho-Won Jeong.

Gambar 2. Pemetaan Konflik

Sumber: (Jeong, 2008)

Pada bagan di atas dapat dilihat bahwa aktor dikategorikan sebagai komponen utama dalam sebuah dinamika konflik. Yang mana aktor memiliki pengaruh sangat besar dalam memberikan perubahan pada dinamika konflik. Selain itu, untuk mencapai sebuah tujuannya pastinya aktor sudah mempersiapkan beberapa strategi yang sudah direncanakan untuk mengatasi sebuah konflik. Dan dengan adanya kebutuhan setiap aktor dan nilai yang dimilikinya pastinya juga memiliki pengaruh pada dinamika konflik untuk mempengaruhi *goalsnya*. Begitu pula dengan *goals* dan isu yang tidak hanya memberikan dampak pada dinamika konflik namun juga memberikan pengaruh pada strategi yang akan digunakan setiap aktor untuk mengatasi situasi konflik. Dan untuk strategi intervensi yang telah dibentuk langsung oleh aktor eksternal, tidak mempengaruhi setiap variabel lainnya namun akan memberikan pengaruh secara langsung pada dinamika konflik itu sendiri.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, nantinya penulis dapat mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat secara alamiah maupun rekayasa manusia, yang mana lebih memfokuskan mengenai beberapa karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Moleong, 2009). Dengan ruang lingkup tahun 2019, ruang lingkup ini dipilih karena jumlah demonstran dari rentang bulan Februari hingga pertengahan 2019 mengalami kenaikan jumlah demonstran yang sangat cepat.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari interpretasi atau pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Data-data sekunder ini berupa majalah, jurnal, dokumen resmi atau tidak resmi, literatur, dan opini dari beberapa ahli, dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik *Anti-Extradition Law Amendment Bill (ELAB)* adalah serangkaian demonstrasi yang sedang berlangsung di Hong Kong. Konflik *Anti-Extradition Law Amendment Bill* ini telah menjadi salah satu protes terbesar dalam sejarah Hong Kong (Ives, 2019). Penolakan RUU Ekstradisi ini dilakukan oleh kelompok Pro-Demokrasi yang menganggap bahwa dengan diberlakukannya RUU Ekstradisi ini akan membatasi yurisdiksi dari penduduk maupun pendatang di Hong Kong, hal tersebut juga dapat mengganggu otonomi daerah dan kebebasan sipil (Cheung & Hughes, 2019). Dengan diberlakukannya RUU ini akan

memungkinkan Hong Kong untuk menahan dan memindahkan orang-orang yang diinginkan di negara-negara dan wilayah-wilayah yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi, termasuk Taiwan dan China Daratan.

Pengusulan dari perencanaan RUU Ekstradisi ini muncul setelah seorang pria Hong Kong yang berusia 19 tahun yang diduga telah membunuh pacarnya saat mereka sedang berlibur bersama di Taiwan. Lalu pria tersebut mencoba untuk melarikan diri dari Taiwan dan kembali ke Hong Kong. Karena hal tersebut membuat para pejabat Taiwan meminta bantuan terhadap otoritas Hong Kong untuk mengekstradisi pria tersebut kembali ke Taiwan untuk diadili, namun para pejabat Hong Kong tidak dapat melakukan dan mematuhi karena Hong Kong sendiri kurang memiliki perjanjian ekstradisi, termasuk ke Taiwan (Li, 2019). Dengan alasan yang diberikan oleh para pejabat Hong Kong rupanya tidak membuat Taiwan berubah pikiran, justru pemerintah Taiwan terus mendesak Hong Kong untuk menangani kasus ini secara terpisah. Menurut pernyataan dari Kepala Eksekutif Carrie Lam sendiri, RUU ini sangat dibutuhkan untuk "menutup celah" sehingga Hong Kong tidak akan menjadi tempat yang aman bagi para penjahat (Li, 2019).

Aksi penolakan RUU Ekstradisi ini dilakukan oleh kelompok Pro-Demokrasi di setiap titik Hong Kong. Pada 3 Agustus, kelompok Pro-Demokrasi melakukan aksi protesnya di Mong Kok (Huang, 2019). Namun beberapa dari mereka juga berbaris untuk memblokir Cross-Harbor Tunnel di Hung Hom. Penangkapan kelompok Pro-Demokrasi di Wong Tai Sin membuat marah penduduk setempat, yang bentrok dengan polisi di dekat markas Layanan Disiplin. Lalu pada 5 Agustus, terdapat seruan pemogokan umum dengan melibatkan 2.300 pekerja penerbangan yang menyebabkan 224 penerbangan dibatalkan karena pemogokan (Regan, Berlinger, Yeung, & Westcott, 2019). Protes dan aksi duduk diadakan di tujuh distrik di Hong Kong. Untuk membubarkan para demonstran, kepolisian menggunakan lebih dari 800 tabung gas air mata, sebuah jumlah rekor untuk Hong Kong. Kelompok Pro-Demokrasi di North Point dan Tsuen Wan diserang oleh dua kelompok pria yang memegang tongkat, meskipun beberapa melawan balik para penyerang. Kelompok Pro-Demokrasi juga melakukan penyerangan dengan mengarahkan laser mereka ke sebuah koran (Asher & Tsoi, 2019).

Dari tanggal 6-7 Agustus, setelah presiden Serikat Mahasiswa Universitas Baptis Hong Kong Fong Chung-yin ditangkap di Sham Shui Po karena memiliki "senjata ofensif", yang ditemukan sebagai pena laser. Terdapat 300 orang kelompok Pro-Demokrasi yang kemudian melakukan aksi pengepungan kantor polisi Sham Shui Po (Leung & Chiu, 2019). Dugaan kebrutalan polisi pada 11 Agustus (termasuk tuduhan bahwa putaran *bean bag* Polisi merusak mata seorang petugas medis, penggunaan gas air mata di dalam ruangan, penyebaran polisi yang menyamar, dan penembakan peluru bola merica kepada para demonstran pada jarak yang sangat dekat) mendorong para kelompok Pro-Demokrasi untuk melakukan aksi duduk selama tiga hari di Bandara Internasional Hong Kong dari 12 hingga 14 Agustus, mendorong Otoritas Bandara untuk membatalkan sejumlah penerbangan selama setidaknya dua hari. Dalam aksi blokade yang dilakukan di bandara Hong Kong terdapat tiga orang yang dikerumuni oleh kelompok Pro-Demokrasi yang dianggap memegang kartu identitas yang menunjukkan bahwa mereka adalah petugas polisi yang dikirim oleh China Daratan (BBC News, 2019e). Sebuah demonstrasi damai diadakan di Victoria Park oleh CHRF pada 18 Agustus untuk mengutuk kebrutalan polisi. CHRF menyatakan menarik setidaknya 1,7 juta orang yang tergabung meskipun dilarang polisi, berbaris ke Central. Diperkirakan tambahan 300.000 anggota Pro-Demokrasi berbaris antara Central dan Causeway Bay, tetapi tidak bisa memasuki taman karena kepadatan penduduk. Polisi menempatkan kehadiran di area sepakbola Victoria Park di 128.000 di puncak (Regan, Berlinger, George, & Yeung, 2019).

Dan pada malam tanggal 23 Agustus, diperkirakan 210.000 orang berpartisipasi dalam kampanye "Jalan Hong Kong," dimana para peserta membentuk rantai manusia untuk menarik perhatian pada lima tuntutan gerakan. Mereka bergandengan tangan untuk menciptakan rantai manusia sepanjang 50 kilometer, membentang di kedua sisi pelabuhan Hong Kong dan di atas Lion Rock. Selama protes tanggal 25 Agustus di Distrik Tsuen Wan dan Kwai Tsing, kelompok Pro-Demokrasi melemparkan batu bata dan bom bensin ke arah polisi, lalu polisi juga memberikan responnya dengan menembakkan gas air mata dan mengerahkan truk meriam air. Setelah dikejar dan diserang oleh sebagian kelompok Pro-Demokrasi, seorang petugas menembakkan tembakan peringatan ke arah langit - ini menandai pertama kalinya babak langsung digunakan sejak demonstrasi pecah pada Juni. Polisi juga menendang seorang lelaki berlutut yang berusaha membujuk para petugas untuk tidak menembak. Mengabaikan larangan polisi dan penangkapan baru-baru ini dari aktivis pro-demokrasi dan anggota parlemen, ribuan kelompok Pro-Demokrasi turun ke jalan-jalan di Pulau Hong Kong pada tanggal 31 Agustus.

Selain itu, pada 1 September, kelompok Pro-Demokrasi juga menitikkan target pada Bandara Internasional Hong Kong (Zheng, 2019). Ratusan kelompok Pro-Demokrasi melarikan diri ke distrik tetangga Tung Chung, dan dengan transportasi yang ditanggguhkan oleh MTR, beberapa kelompok Pro-Demokrasi berjalan di rute 15 kilometer di jalan raya menuju daerah perkotaan dari Pulau Lantau. Evakuasi massal dijuluki oleh beberapa media sebagai "Dunkirk Hong Kong". Pada 2 dan 3 September, ribuan siswa sekolah dan universitas memboikot kelas pada di Hong Kong untuk bergabung dengan protes. Terdapat 10.000 siswa dari 200 sekolah menengah dilaporkan tidak muncul untuk hari pertama tahun ajaran baru (BBC News, 2019d). Rapat umum diadakan di Pulau Hong Kong untuk orang-orang yang berpartisipasi dalam pemogokan umum. Kelompok pro-Demokrasi juga melakukan pengepungan terhadap kantor polisi yang ada Mong Kok untuk mengutuk kebrutalan polisi pada tanggal 31 Agustus dan menuntut MTR Corporation untuk melepaskan rekaman CCTV malam itu.

Pada bulan Oktober juga terjadi penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Pro-Demokrasi dengan melemparkan bom bensin yang dilemparkan ke arah kantor polisi karena pihak kepolisian menolak izin untuk melakukan aksi protes tersebut yang menargetkan perbelanjaan kelas atas sehingga dapat mengancam ketertiban umum di Hong Kong. Dengan adanya hal tersebut membuat kelompok Pro-Demokrasi menentang dan melakukan aksi protes dengan berpakaian hitam guna untuk menutup identitas mereka dan melakukan penyerangan terhadap kantor polisi (BBC News, 2019a).

Selanjutnya pada bulan November, para kelompok Pro-Demokrasi menghantam jaringan transportasi kota itu untuk hari kedua yang berjalan pada hari Selasa ketika kekuatan barat menyuarakan keprihatinan atas kekerasan yang meningkat setelah polisi menembak seorang demonstran muda dan seorang pria lainnya dibakar. Kelompok Pro-Demokrasi juga menutup identitas mereka dengan menggunakan topeng hitam untuk memblokir jalan, melemparkan benda ke rel kereta api dan mengangkat kereta bawah tanah, memicu bentrokan kucing dan tikus dengan polisi anti huru-hara dan kekacauan baru pada perjalanan pagi. Universitas juga merupakan titik nyala dengan polisi menembakkan gas air mata ke arah para pengunjung rasa yang memblokir jalan menuju Universitas Kota Hong Kong (Taylor & Xinqi, 2019).

Dan yang terakhir tepat di hari Natal, Ratusan kelompok Pro-Demokrasi dengan berpakaian hitam dan memakai topeng wajah, turun ke pusat perbelanjaan di sekitar kota yang dikuasai Cina, meneriakkan slogan-slogan populer seperti "Bebaskan Hong Kong! Revolusi zaman kita!". Aksi protes yang dilakukan oleh kelompok Pro-Demokrasi ini membuat Natal tahun 2019 masyarakat Hong Kong sendiri menjadi hancur. Selain itu

terdapat platform yang terlibat untuk melakukan aksi penggalangan dana yang dapat mendukung kelompok Pro-Demokrasi (Siu, 2019).

Dinamika Konflik

Penulis dalam melakukan analisis dalam penelitian ini menggunakan konsep dinamika konflik milik Ho-Won Jeong. Dinamika eskalasi konflik dapat dipengaruhi oleh tiga variabel yakni perubahan internal, pengaruh eksternal dan kompleksitas antara dua aktor. Dalam pembahasannya, setiap variabel memiliki turunan indikator di dalamnya untuk mempermudah dalam menganalisis konflik *Anti-Extradition Law Amendment Bill* di Hong Kong.

Pertama, perubahan internal nantinya akan memiliki tiga turunan indikator yakni *resistance group*, pola interaksi, dan aliansi pada pihak internal. Kedua, pengaruh eksternal yang memiliki dua turunan indikator yakni konteks regional dan internal dan adanya dukungan eksternal. Dan variabel yang terakhir, kompleksitas antara dua aktor yang memiliki delapan turunan indikator di dalamnya yang membahas tentang penambahan aktor, perubahan tujuan, perbedaan nilai, perubahan tingkat kebutuhan, perubahan kepentingan, perkembangan isu yang terkait, perubahan *style* dan perubahan strategi.

Dinamika Politik Domestik

Keberadaan dan tingkah laku dari sebuah *resistance group* memiliki peran yang cukup penting untuk menentukan kelanjutan jalannya suatu konflik. *Resistance group* nantinya akan membentuk sebuah kelompok sendiri untuk melakukan sebuah perlawanan menggunakan sebuah kekerasan untuk mencapai sebuah tujuannya. (Jeong, 2008). Dalam konflik *Anti-Extradition Law Amendment* ini berawal dari adanya kelompok pemberontak yang berdiri yaitu kelompok Pro-Demokrasi. Kelompok Pro-demokrasi berdiri karena mereka mengidentifikasi diri sebagai orang China karena perbedaan hukum, sosial, dan budaya antara Hong Kong dan China Daratan. Selain itu kelompok Pro-Demokrasi ini juga tidak lagi percaya diri dengan sistem yang seharusnya melindungi hak-hak mereka. Kelompok yang ini kebanyakan berasal dari kalangan anak muda, karena mereka menganggap bahwa semakin muda usia mereka maka semakin tidak percaya pada Pemerintah pusat. Seiring dengan adanya sentimen masa depan yang tidak pasti akhirnya mendorong kelompok pro-demokrasi ini untuk bergabung dan melawan RUU Ekstradisi yang sedang terjadi. Dari kubu kelompok Pro-demokrasi juga terlihat banyak tokoh terkenal seperti kardinal Joseph Zen, pengacara Martin Lee dan Margaret Ng, serta pemilik dari Apple Daily Jimmy Lai yang bergabung untuk mengikuti aksi protes ini (Chan, 2019).

Bergabungnya kelompok pemberontak Pro-Demokrasi ini dipicu dari penolakan mereka terhadap RUU Ekstradisi, karena masyarakat Hong Kong berpendapat jika RUU Ekstradisi ada maka akan mengancam demokrasi dan hukum di wilayah Hong Kong itu sendiri. Kelompok pemberontak ini juga melakukan pengumpulan dana untuk memasang iklan di surat kabar Internasional utama dan mengadakan konferensi pers untuk "menyiarkan suara-suara yang kurang terwakili" dan perspektif mereka sendiri kepada publik untuk melawan konferensi polisi dan pemerintah. Selain itu, para kelompok pemberontak juga berusaha untuk memberikan informasi pada para wisatawan tentang konflik Hong Kong yang sedang terjadi saat ini dengan melakukan aksi duduk di Bandara Internasional Hong Kong dan menggunakan fitur *AirDrop* yang merupakan salah satu perangkat Apple untuk menyiarkan informasi tagihan anti-ekstradisi para wisatawan umum dan wisatawan daratan (Yiu-man, 2019).

Gambar 3. *Airdrop*

Sumber: (Data Olahan Penulis)

Dari gambar di atas merupakan penyebaran *Airdrop* yang digunakan sebagai media bagi para kelompok Pro-Demokrasi untuk menyebarkan informasi terkait kondisi yang sedang dialami oleh Hong Kong yang ditujukan pada wisatawan dan masyarakat Hong Kong lainnya didapatkan penulis secara langsung ketika penulis sedang melakukan Praktik Kerja Nyata di Hong Kong. Penyebaran informasi melalui *Airdrop* ini dilakukan secara acak dan dilakukan di semua titik keramaian.

Untuk melakukan pendalaman dalam menganalisis konflik *Anti-Extradition Law Amendment* di Hong Kong, konsep dinamika konflik milik Ho-Won Jeong menjelaskan bahwa pola interaksi dapat dilakukan oleh suatu kelompok, organisasi atau pasukan perlawanan untuk melakukan sebuah interaksinya dengan kelompok lainnya. Namun Ho-Won Jeong juga berpendapat bahwa pola interaksi dapat memberikan hambatan pada proses negosiasi yang nantinya akan membuat situasi konflik semakin besar.

Dengan melihat pada konflik *Anti-Extradition Law Amendment Bill* yang terjadi di Hong Kong, penulis melihat bahwa dalam konflik Hong Kong berasal dari kelompok-kelompok kecil yang terorganisir yang akhirnya membentuk sebuah kelompok besar yang memiliki kesamaan tujuan dan kepentingan. Kelompok tersebut sering disebut dengan kelompok Pro-Demokrasi, kelompok ini terbentuk karena mereka memiliki identitas dan tekad yang sangat kuat sebagai sebuah kelompok pemberontak dalam melakukan penolakan dari pengesahan RUU Ekstradisi tersebut. Dalam mempertahankan posisi dan mencapai tujuannya, kelompok Pro-Demokrasi ini melakukan banyak cara hingga menggunakan cara kekerasan agar suara mereka di dengar.

Sebelum terjadinya konflik Anti-Extradition ini berlangsung hubungan antara Kepala Eksekutif Carrie Lam dan masyarakat Hong Kong pada tahap yang baik-baik. Namun dengan adanya rencana dalam pengesahan RUU ekstradisi ini mulai timbul perbedaan kepentingan antara Carrie Lam dan kelompok Pro-Demokrasi sehingga menimbulkan adanya gesekan yang berujung pada konflik yang berkepanjangan. Suatu dinamika dalam sebuah situasi konflik akan muncul ke arah eskalasi karena adanya isu-isu yang terlibat seperti isu perang dagang (AP News, 2019). Sehingga membuat konflik ini menjadi luas dan akan sulit diprediksi penyelesaiannya. Selain itu juga terlibatnya pihak-pihak eksternal yang membantu kelompok Pro-Demokrasi seperti Amerika Serikat dan organisasi Civil Human Right Front. Kedua pihak eksternal ini secara langsung terlibat dalam konflik yang sedang memanas ini karena mereka memiliki kesamaan tujuan dalam membantu Hong Kong untuk mencapai kebebasannya. Dengan terlibatnya Amerika Serikat yang memposisikan dirinya sebagai

pendukung kelompok Pro-Demokrasi ini membuat AS mengambil kesempatan untuk mencuri perhatian Hong Kong yang ada kaitannya dengan isu perang dagang China dan Amerika Serikat.

Dan sebaliknya, dari sisi Kepala Eksekutif Carrie Lam juga mendapatkan dukungan penuh yang diberikan dari Pemerintahan China yang menganggap bahwa kondisi Hong Kong sedang berubah menjadi arena teror. Karena hal tersebut membuat China sendiri memberikan dukungannya terhadap Pemerintahan Hong Kong yaitu Carrie Lam untuk membantu Carrie Lam dalam mengakhiri kerusuhan yang sedang terjadi di Hong Kong dan mengembalikan ketertiban Hong Kong seperti dahulu (Sebayang, 2019b).

Pola Aliansi Pihak Internal

Untuk membahas dinamika Internal yang terjadi pada suatu konflik, tidak bisa mengesampingkan adanya keberadaan aliansi. Keberadaan sebuah aliansi ini juga menunjukkan adanya perilaku pengumpulan kekuatan dari berbagai organisasi atau partai politik yang memiliki kesamaan tujuan untuk adanya perubahan pada suatu sistem suatu negara. Perilaku pembentukan aliansi ini berguna untuk melihat hubungan yang saling mendukung untuk melawan musuh yang sama. Melihat dari konflik *Anti-Extradition Law Amendment Bill* di Hong Kong, terdapat sebuah organisasi Internasional yang ikut turun dalam konflik ini yakni organisasi Civil Human Right Front. Organisasi ini hadir karena memiliki tujuan untuk membantu masyarakat Hong Kong supaya mendapatkan kebebasannya lagi. Organisasi Civil Human Right Front ini untuk pertama kalinya mendapatkan persetujuan polisi untuk ikut turun langsung dalam aksi protes yang sedang terjadi di Hong Kong pada pertengahan Agustus (Lok-Kei, 2019).

Dalam melakukan aksi protesnya pada hari Minggu, organisasi Civil Human Right Front berharap terdapat 32.000 orang untuk bergabung dalam pawai dan memberikan sebuah masukan agar kelompok Pro-Demokrasi dapat mengurangi kontak langsung dengan polisi (Lok-Kei, 2019). Dalam berlangsungnya aksi protes, polisi juga memohon kepada organisasi Civil Human Right Front agar mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan acara aksi protes ini tetap berjalan dengan cara yang sah dan tertib.

Organisasi Civil Human Right Front mengatakan bahwa pada hari Senin yang akan datang akan menjadi tanda enam bulan sejak rapat umum pada 9 Juni yang memicu krisis politik yang telah mencengkeram wilayah China semi-otonom ini. Front mengatakan bahwa hal tersebut akan menjadi kesempatan terakhir Pemerintah untuk memenuhi tuntutan mereka, yang meliputi penyelidikan independen terhadap penanganan polisi terhadap protes, amnesti bagi mereka yang ditangkap dan pemilihan bebas (BBC News, 2019b).

Pengaruh Eksternal

Konteks Regional dan Internasional

Pada situasi sebuah konflik konteks regional dan Internasional juga memiliki pengaruh terhadap dinamika konflik suatu konflik. Dengan melihat situasi regional awal terjadinya konflik Hong Kong yang sedang memanas akibat adanya penolakan RUU Ekstradisi dari mayoritas masyarakat Hong Kong membuat terbentuknya suatu kelompok besar yang terorganisir yang memiliki kesamaan tujuan yang berfokus pada penolakan dari RUU Ekstradisi, pencabutan karakteristik kerusuhan, pembebasan para demonstran yang sudah ditangkap, Pembentukan komisi penyelidikan independen tentang perilaku polisi dan penggunaan kekuatan selama protes, hingga tuntutan untuk mencabut masa kepemimpinan dari Pemerintahan Hong Kong saat ini.

Pada tahun 2019 terdapat situasi regional awal terjadinya konflik *Anti- Extradition Law Amendment Bill* yang memanas dengan melakukan penolakan pengesahan RUU Ekstradisi di

Hong Kong. Seiring berjalannya konflik yang memanas ini mendorong munculnya situasi Internasional yang berfokus pada perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Hal tersebut diperkuat dengan adanya sebuah undang-undang AS yang mendukung kelompok Pro-Demokrasi di Hong Kong. Presiden AS juga telah menandatangani Undang-Undang yang dikenal sebagai Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi yang mensyaratkan tinjauan tahunan status khusus Hong Kong dengan AS (da Costa, 2019). Presiden Donald Trump juga mengatakan bahwa situasi yang sedang terjadi di Hong Kong ia melihat adanya hubungan antara protes kelompok Pro-Demokrasi di Hong Kong dengan negosiasi perdagangan (AP News, 2019).

Dengan adanya keikutsertaan AS terhadap konflik Hong ini membuat Carrie Lam memberikan sebuah peringatan terhadap AS agar tidak ikut campur pada konflik tersebut. Peringatan ini dilontarkan ketika para kelompok Pro-Demokrasi menyerukan permintaan bantuan kepada presiden Amerika Serikat agar bertindak lebih lanjut, meningkatkan tekanan dari yang sebelumnya dan membantu Hong Kong agar dapat bebas dari China (Vidya, 2019a). Kelompok Pro-Demokrasi ini kembali turun ke jalan pada Hari Minggu 8 September 2019 dan mereka bergerak ke konsulat AS untuk mendesak Kongres mengesahkan RUU yang menyatakan dukungan pada gerakan Pro-Demokrasi di Hong Kong (CNN Indonesia, 2019a). Namun tindakan yang dilakukan oleh kelompok Pro-Demokrasi ini membuat Carrie Lam sendiri geram dan kembali memberikan peringatan bahwa setiap perubahan dalam hubungan ekonomi yang terjadi di Hong Kong dengan Washington akan dapat mengancam keuntungan antara kedua belah pihak (Vidya, 2019a). Carrie Lam menyadari bahwa perekonomian Hong Kong saat ini berpotensi menghadapi masalah yang didukung dengan adanya pembatalan pemesanan hotel dan bisnis ritel yang dibatalkan oleh para pelancong dan ditambah lagi dengan adanya isu perang dagang antara AS dan China (Mangkuto, 2019a).

Namun pernyataan Carrie Lam sendiri tidak membuat AS sendiri merasa terancam karena dapat dibuktikan bahwa sejumlah politisi AS menyatakan memberikan dukungannya terhadap kelompok Pro-Demokrasi yang menginginkan demokrasi di Hong Kong (Mangkuto, 2019a). Presiden Donald Trump juga telah menyampaikan pernyataannya bahwa ia akan tetap mendukung kelompok Pro-Demokrasi dan memilih untuk melakukan pendekatan yang lebih mudah yang ada kaitannya dengan perang dagang untuk melawan China (Mangkuto, 2019a).

Aliansi Eksternal

Transformasi konflik akan timbul dari sebuah adaptasi yang ada dalam dimensi eksternal maupun dinamika internal. Jeong mengatakan bahwa *"If external intervention on behalf of a weaker party is designed to redress asymmetric power relations, it can compel a stronger party to cease escalatory tactics."* Dari pernyataan yang telah dipaparkan oleh Jeong memiliki makna dengan adanya dukungan eksternal dapat membantu aktor utama dalam menyeimbangkan atau menambah kekuatannya dalam sebuah situasi konflik sehingga secara langsung juga akan memberikan pengaruh atau dampak terhadap dinamika konflik pada situasi konflik (Jeong, 2008).

Dengan melihat konflik yang sedang terjadi di Hong Kong, penulis mengidentifikasi dukungan eksternal ini dengan membaginya menjadi dua yaitu dukungan eksternal yang diberikan kepada Hong Kong khususnya Kepala Eksekutif Hong Kong yakni Carrie Lam dan dukungan eksternal yang diberikan kepada kelompok Pro-Demokrasi yang melakukan penolakan terhadap pengesahan RUU Ekstradisi itu sendiri. Dukungan yang diberikan kepada Kepala Eksekutif Hong Kong sendiri berasal dari China, dengan menurunkan pasukan polisi bersenjata yang akan membantu dalam menumpas protes yang terjadi di Hong Kong. Tentara China ini dikirim agar mereka dapat membantu sekelompok warga untuk

membersihkan blok jalan yang didirikan oleh demonstran Anti-Pemerintah, menggunakan sapu dan ember plastik. Selain itu juga terdapat alasan dari China sendiri yang sengaja mengirimkan pasukan tentaranya ke Hong Kong yakni untuk menghentikan kekerasan yang terjadi selama konflik *Anti-Extradition Law Amendment Bill* ini berlangsung dan membantu mengakhiri kekacauan yang sudah terjadi akibat dari konflik ini (Kuo, 2019). China menganggap bahwa konflik yang terjadi di Hong Kong dapat mempengaruhi perekonomian Hong Kong dan membuat kondisi Hong Kong sendiri semakin tidak kondusif.

Dan dukungan eksternal yang kedua yang diberikan kepada kelompok Pro-Demokrasi tersebut berasal dari Amerika Serikat. Dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat ini dilandasi karena Amerika Serikat mendukung kelompok Pro-Demokrasi dalam menuntut demokrasi di Hong Kong sendiri. Dukungan ini diberikan diperkuat dengan adanya suara yang masuk kepada pihak Amerika yang meminta bantuan untuk menentukan kelanjutan dari masa depan negara mereka yakni Hong Kong (M. Wong, 2019). Presiden Donald Trump juga telah menyampaikan pernyataannya bahwa ia akan tetap mendukung kelompok Pro-Demokrasi dan memilih untuk melakukan pendekatan yang lebih mudah yang ada kaitannya dengan perang dagang untuk melawan China (Vidya, 2019a).

Kompleksitas Antar Aktor

Suatu pemetaan dapat dilakukan dengan berfokus kepada individu ataupun kelompok yang dapat memberikan pengaruhnya terhadap dinamika konflik pada situasi konflik. Selanjutnya dalam mengidentifikasi suatu aktor dapat dilihat dari tujuan dan sikap mereka terhadap sebuah isu (Jeong, 2008).

Awal dari konflik *Anti-Extradition Law Amendment Bill* (ELAB) yang di Hong Kong ini melibatkan dua kelompok internal dan eksternal yang memiliki pengaruh terhadap dinamika konflik. Pertama kelompok Pro-Demokrasi, yang mana kelompok ini melakukan pemberontakan untuk menyuarakan aspirasinya untuk menolak pengesahan dari RUU Ekstradisi. Menurut data dari CHRF (Civil Human Rights Front), terdapat 12.000 orang yang mengambil bagian dalam aksi protes tersebut di Wan Chai dan berlanjut ke Admiralty (Chan, 2019). Pihak polisi juga menyatakan angka puncak dari jumlah kelompok Pro-Demokrasi yang terlibat hingga mencapai 5.200 (Chan, 2019). Dan terjadi peningkatan yang signifikan pada pertambahan jumlah aktor yang terlibat terbukti dengan meningkat terbukti pada akhir bulan April jumlah demonstran kembali meningkat dengan jumlah 130.000 hingga polisi juga mengatakan angka puncak dari demonstran kelompok Pro-Demokrasi yang tergabung mengalami kenaikan juga hingga mencapai 22.800 orang yang tergabung (Lok-Kei & Kang-chung, 2019). Karena jumlah demonstran semakin meningkat, aksi protes konflik Anti-Extradition ini tergolong dalam protes terbesar yang terjadi di Hong Kong (BBC News, 2019c).

Kelompok Pro-Demokrasi ini dipimpin oleh seorang pemuda bernama Joshua Wong yang berasal dari sebuah partai yang mendukung sebuah perubahan demokrasi di Hong Kong atau yang dikenal sebagai Pro-Demokrasi (Sebayang, 2019d). Untuk menjalankan misi Joshua Wong yang akan menuntut demokrasi di Hong Kong, ia memiliki rencana untuk melakukan perjalanan ke Washington, Amerika Serikat (AS) bulan depan bersama Agnes Chow. Tujuan datang ke Amerika Serikat mereka akan bertemu dengan anggota parlemen dan ikut serta dalam Komite Kongres untuk melakukan kegiatan yang bernama dengar pendapat tentang China yang ada kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi yang di Hong Kong sendiri (Sebayang, 2019d). Selain itu kelompok Pro-Demokrasi juga mendapatkan bantuan dari organisasi Civil Human Right Front yang memiliki kesamaan tujuan dengan Amerika Serikat dalam membantu Hong Kong untuk mencapai kebebasannya lagi.

Namun segala upaya yang sudah direncanakan Joshua Wong tidak berjalan mulus, karena Wong terlebih dulu ditangkap oleh pihak polisi Hong Kong yang telah mengetahui rencana Wong. Wong ditangkap atas 3 tuduhan yaitu mengatur pertemuan secara ilegal, menghasut para anggota demo yang lainnya, dan yang terakhir Wong menjadi bagian dalam pertemuan ilegal selama kegiatan pengepungan yang dilakukan di markas polisi di Wan Chai Hong Kong (Sebayang, 2019d).

Lalu juga terdapat pihak eksternal yang terlibat dan mempengaruhi dinamika konflik yang terjadi di Hong Kong yakni kelompok Pro-Pemerintah. Kelompok ini sebagian besar berasal dari negara Mainland China. Masuknya aktor eksternal ini memiliki aliansi dalam mendukung Kepala Eksekutif Carrie Lam yang dapat dibuktikan dengan pernyataan dari Presiden China Xi Jinping yang mengatakan bahwa Pemerintahan pusat sepenuhnya mendukung kepala Eksekutif Hong Kong yakni Carrie Lam (Cheng, 2019a). Pemerintahan Xi Jinping juga mendukung setiap fase tindakan selanjutnya yang akan diusulkan dan dilakukan pemerintahan Hong Kong. Xi Jinping juga berharap di bawah kepemimpinan kepala eksekutif yakni biro dan departemen pemerintahan Hong Kong dapat melakukan tugas dan bekerja sama satu sama lain dengan baik agar dapat menangani permasalahan yang sedang terjadi di Hong Kong, dapat menghentikan kekerasan yang sudah terjadi di Hong Kong dan yang terakhir dapat mengembalikan ketenangan negara Hong Kong sendiri secepat mungkin (Cheng, 2019a). Xi Jinping juga menegaskan bahwa dukungan yang diberikan ditujukan kepada Kepala Eksekutif Carrie Lam dan mendukung penuh pihak kepolisian Hong Kong dalam menegakkan hukum yang tegas dan mendukung Carrie Lam dalam menjunjung tinggi prinsip "*one state, two system*" (The Straits Times, 2019a).

Kepala Eksekutif Carrie Lam menyadari bahwa kondisi yang dihadapi Hong Kong saat ini sangat sulit karena selama enam bulan terakhir Hong Kong telah dihantui oleh kerusuhan sosial, gangguan dan tindakan kekerasan. Carrie Lam juga mengatakan bahwa dirinya telah menghabiskan banyak waktu untuk terus memberikan penjelasan pada kelompok pemberontak Pro-Demokrasi. Namun di tengah tanda-tanda meningkatnya kesengsaraan ekonomi kota, Pemerintah Xi Jinping telah berjanji kepada Carrie Lam bahwa China akan terus melakukan penawaran kebijakan ekonomi yang menguntungkan dan memberikan dukungan penuh kepada Carrie Lam dan Hong Kong (The Straits Times, 2019a).

Jeong mengatakan bahwa tujuan dapat dijadikan sebagai kondisi masa depan yang diinginkan yang dapat membentuk sebuah motivasi dan dijadikan sebagai kompetisi untuk mencapai tujuannya (Jeong, 2008). Dilihat dari konflik *Anti-Extradition Law Amendment Bill* (ELAB) di Hong Kong terdapat perubahan tujuan politik yang tujuan awalnya yaitu berasal dari penangkapan dari seorang pedagang buku yang bernama Lam Wing Kee yang dituding telah menjual buku yang mengkritik Pemerintah China di tahun 2015 (Li, 2019). Lam Wing Kee, seorang penjual buku Hong Kong, mengatakan ia diculik, ditahan dan didakwa dengan "mengoperasikan toko buku secara ilegal" di Tiongkok pada 2015 karena menjual buku-buku yang kritis terhadap para pemimpin Tiongkok (Li, 2019).

Penangkapan ini dilakukan oleh pihak kepolisian China yang menunjukkan bahwasanya pengadilan yang bersifat sewenang-wenang di bawah sistem peradilan China. Berdasarkan dari hal tersebut dapat dilihat bahwa China ingin menekankan kepada Hong Kong bahwa China masih memiliki kendali terhadap Hong Kong, khususnya dari sistem peradilan yang dimiliki oleh China sendiri.

Di sisi lain terdapat sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Chan Tong-kai yang merupakan pria asal Hong Kong terhadap kekasihnya di bulan Februari 2018. Aksi pembunuhan ini didasari karena motif rasa cemburu. Chan ditangkap pada 13 Maret 2018 oleh pihak kepolisian Hong Kong. Di Hong Kong, Chan dijatuhi hukuman 29 bulan penjara,

tetapi Pengadilan Tinggi mengurangi hukumannya yang kemudian pada 18 Oktober 2018, sehari sebelum Chan dibebaskan; Pemerintah Hong Kong memberikan pernyataan mengenai pelanggaran yang dilakukan Chan di Taiwan (Sui, 2019). Pernyataan tersebut menyatakan bahwasanya peradilan Hong Kong tidak memiliki yurisdiksi secara sah untuk menjatuhkan hukuman terhadap Chan. Pihak berwenang Hong Kong menggunakan permintaan Taiwan agar Chan diekstradisi sebagai alasan untuk mengajukan sebuah RUU yang kontroversial untuk memungkinkan ekstradisi tersebut. RUU ini akan memungkinkan tersangka kriminal untuk dikirim ke Taiwan serta China Daratan. (Sui, 2019).

Namun pada nyatanya, RUU ini tidak dapat dilakukan karena Hong Kong sendiri tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Taiwan dan China Daratan. Dengan melihat kasus ini membuat Carrie Lam akhirnya merencanakan perjanjian RUU Ekstradisi ke Taiwan serta China Daratan. Namun perencanaan pengesahan RUU Ekstradisi itu ditolak oleh sebagian besar masyarakat Hong Kong karena mereka menganggap dengan adanya pengesahan RUU Ekstradisi ini akan merampas kebebasan mereka terutama dalam menghadapi pemerintah komunis China yang telah membungkam kemerdekaan dari Hong Kong (CNN Indonesia, 2019b).

Nilai dan sumber adalah sesuatu yang dapat menggabungkan konsep pemenuhan keinginan dan cara yang dapat digunakan untuk mencapai suatu keinginan tertentu. Dengan adanya perbedaan nilai antar pihak yang terlibat dapat memicu terjadinya permasalahan yang dapat berujung terjadinya sebuah konflik (Jeong, 2008). Dengan melihat konflik yang saat ini terjadi di Hong Kong terdapat perbedaan nilai antara China dan Hong Kong. Perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa Hong Kong menerapkan sistem kapitalis sedangkan China menerapkan sistem sosialis, khususnya dalam sektor perekonomian (Boland, 2019). Perbedaan nilai antara China dan Hong Kong terlihat secara signifikan yang terletak pada penyebab terjadinya Revolusi Payung, yang dikarenakan masyarakat Hong Kong menginginkan sistem pemerintahan yang dipilih melalui pemilihan umum atau dengan kata lain masyarakat Hong Kong menginginkan bentuk pemerintahan Republik (Pemerintah.Net, 2014). Sedangkan sistem pemerintahan yang dianut oleh China sendiri yaitu negara dengan bentuk pemerintahan komunis, yang menganut sistem satu partai dan menjadikan China sebagai negara komunis terbesar di dunia pada saat ini (Albert & Xu, 2019).

Menurut penulis, dengan adanya perbedaan nilai membuat munculnya gesekan antara China dan Hong Kong. Penulis melihat bahwa perbedaan nilai yang dianut ini tidak dapat diterima sehingga menimbulkan respons yang negatif khususnya bagi kelompok Pro-Demokrasi dan dapat dijadikan sebagai faktor pendorong bagi masyarakat Hong Kong dalam melakukan penolakan dari RUU Ekstradisi yang dilakukan ke Taiwan dan China Daratan. Selain itu juga dengan adanya persamaan nilai yang muncul ini memberikan dampak pada berkembangnya dinamika konflik yang terjadi di konflik Hong Kong yang dapat dilihat dengan adanya penambahan aktor yang tergabung pada kelompok Pro-Demokrasi dengan memiliki kesamaan nilai, selain itu juga terdapat pihak Eksternal yang memberikan dukungan penuh terhadap kelompok Pro-Demokrasi dengan berlandaskan kesamaan nilai.

Menurut Jeong, kebutuhan manusia dapat mencerminkan sebuah motivasi yang dapat dianggap sebagai primordial dan genetis guna untuk kelangsungan hidup dari setiap individu (Jeong, 2008). Merujuk pada konflik yang terjadi di Hong Kong, dengan adanya aksi pemberontakan ini memberikan dampak pada tingkat kebutuhan bagi masyarakat yang dinilai tidak terpenuhi dengan melihat dari indeks kerugian yang dialami oleh Hong Kong yang sangat tinggi sehingga memberikan dampak pada ketidakstabilan ekonomi di Hong Kong. Sedangkan Hong Kong merupakan pusat keuangan dan bisnis global yang menghubungkan China dan dunia. Salah satu pendorong utama kemerosotan ekonomi di Hong Kong adalah penurunan yang sangat pesat pada penjualan ritel yang disebabkan dari konflik *Anti-*

Extradition tersebut (Lee, 2019). Terdapat beberapa ahli yang berpendapat dalam South China Morning Post (SCMP) terdapat beberapa kerusakan yang terjadi khususnya pada sektor bisnis seperti ritel, makanan, transportasi dan hotel dan membuat Hong Kong sendiri mengalami defisit hingga HK\$ 1.9 miliar (Mangkuto, 2019c). Selain itu juga terjadi penurunan terhadap jumlah pengunjung yang masuk ke Hong Kong yang secara otomatis juga berpengaruh terhadap ketidakstabilan ekonomi Hong Kong yang menyebabkan kehilangan keuntungan yang cukup besar sebanyak HK\$ 2,8 miliar sejak 1 Oktober 2019 (Mangkuto, 2019c).

Dengan melihat hal tersebut, penulis melihat bahwa ketidakstabilan perekonomian yang sedang dialami oleh Hong Kong ini terjadi karena adanya ketidakpuasan masyarakat Hong Kong terhadap kinerja Carrie Lam sehingga membuat masyarakat Hong Kong sendiri melakukan penyerangan dan penolakan terhadap pengesahan RUU Ekstradisi. Kemudian juga dapat dilihat dari kebutuhan akan rasa aman yang tidak terpenuhi karena dengan disahkannya RUU Ekstradisi ini akan membuat Hong Kong kembali jatuh di tangan China. Dan Hong Kong akan terus menerus merasa bahwa kebebasannya masih dibatasi oleh China. Karena hal itu akhirnya membentuk sebuah motivasi bagi kelompok pemberontak dalam melakukan perlawanan dan penolakan terhadap pengesahan RUU Ekstradisi ini. Karena Hong Kong tidak ingin kebebasannya dibatasi kembali oleh China akhirnya mereka membentuk sebuah kelompok yang memiliki kesamaan tujuan dan kepentingan sehingga dilanjutkan dengan melakukan pemberontakan pada awal dimulainya konflik di Hong Kong.

Adanya perbedaan kepentingan pada setiap kelompok dihasilkan dari situasi sosial yang kompetitif akan membuat kedua belah pihak yang bertikai menjadikan 'kepentingan' sebagai suatu aspirasi untuk mencapai tujuan hingga menunjukkan hasil akhir yaitu antara kalah ataupun menang (Jeong, 2008). Dilihat dari kasus yang sedang terjadi di Hong Kong, sejak awal telah memiliki kepentingan yang harus dicapai oleh kelompok Pro-Demokrasi yakni melakukan penolakan terhadap pengesahan RUU Ekstradisi yang telah direncanakan oleh Kepala Eksekutif Carrie Lam. Penolakan ini dilakukan karena kelompok Pro-Demokrasi khawatir dengan diberlakukannya RUU Ekstradisi ini akan membuat kebebasannya menjadi terbatas dan diintervensi oleh China. Selama konflik ini berlangsung kelompok Pro-Demokrasi banyak menggunakan berbagai cara untuk melawan kekuatan dari pihak polisi Hong Kong seperti dengan menghancurkan jendela, menyalakan api dengan membakar sejumlah kardus yang ada di jalanan (Yiu-man, 2019).

Munculnya konflik yang di Hong Kong ini menunjukkan adanya perubahan kepentingan oleh kelompok Pro-Demokrasi yang berawal dari kepentingan penegakan Hak Asasi dari Hong Kong sendiri dan akhirnya membuat sebagian besar kelompok Pro-Demokrasi turun ke jalan untuk melakukan aksi dalam menyampaikan aspirasi mereka dan kemudian mengalami perubahan kepentingan yang dituntut oleh kelompok Pro-Demokrasi dengan memberikan tuntutan untuk melakukan penggulingan masa Pemerintahan Carrie Lam, penuntutan ini diajukan karena masyarakat Hong Kong menganggap bahwa Carrie Lam telah mengecewakan kepercayaan mereka terhadapnya yang telah bersumpah untuk melayani. Carrie Lam telah melakukan kesalahan dengan tidak mendengarkan permintaan orang-orang untuk meluncurkan penyelidikan independen terhadap bentrokan protes yang sedang terjadi (Ng, 2019). Carrie Lam juga dianggap sebagai bagian dari masalah bukan sebagai bagian dari solusi. Kekecewaan yang dirasakan masyarakat Hong Kong ini menganggap Carrie Lam hanya sebagai Kepala Eksekutif Hong Kong dalam nama saja, karena Carrie Lam sendiri tidak lagi memiliki kepercayaan dari rakyat Hong Kong (Ng, 2019).

Perubahan kepentingan yang terjadi di konflik Hong Kong menunjukkan bahwa dengan kondisi Hong Kong yang semakin tidak teratur membuat kelompok Pro-Demokrasi sudah tidak memiliki pilihan lain untuk mengakhiri tuntutan mereka. Dan yang terakhir kelompok Pro-Demokrasi juga melakukan koalisi yang masih aktif selama konflik ini terjadi dengan

melakukan *lobbying* untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dalam menuntut demokrasinya sendiri yang dianggap sebagai kepentingan politik.

Menurut Jeong, isu yang berkembang dapat mempengaruhi suatu dinamika konflik dalam situasi konflik. Oleh karena itu Jeong mengatakan bahwa sebuah masalah akan muncul ketika isu mulai berkembang sehingga dapat dianggap sebagai titik pertikaian yang harus segera diselesaikan, karena dengan menyelesaikan permasalahan dapat memberikan pencerahan dalam mengungkapkan motif konflik yang sedang terjadi (Jeong, 2008).

Dengan berkaca dari konflik *Anti-Extradition Law Amendment Bill* yang terjadi di Hong Kong terdapat kebutuhan dari masing-masing aktor untuk mencapai sebuah kepentingannya masing-masing. Dalam konflik Anti-Extradition Law Amendment tahun 2019 ini terdapat perkembangan isu yang bersifat *less tangible* seperti keamanan negara, isu untuk pemisahan diri dan adanya isu perang dagang yang terjadi antara China dan Amerika Serikat. Isu yang semakin berkembang ini terjadi ketika Carrie Lam dan masyarakat Hong Kong atau yang sering disebut kelompok Pro-Demokrasi ini mulai terjadi perbedaan kepentingan dan tujuannya. Karena hal tersebut akan memberikan dampak pada isu semakin berkembang tersebut menjadi konflik yang berkepanjangan dan menyebabkan eskalasi konflik semakin meningkat.

Dari dimulainya tuntutan yang diajukan oleh kelompok Pro-Demokrasi, membuat terjadinya perkembangan isu-isu yang kemudian menjadi isu yang semakin besar khususnya mengenai isu yang berfokus kepada keamanan dari Hong Kong sendiri yang menganggap bahwa Hong Kong akan kehilangan keamanan dan kebebasannya. Dengan hilangnya keamanan dan kebebasan dari Hong Kong sendiri ini dapat dipengaruhi oleh pengesahan RUU Ekstradisi yang dilakukan ke Taiwan dan China Daratan sehingga akan memberikan dampak pada Hong Kong yang menganggap akan terus mendapat tekanan dan campur tangan yang dilakukan oleh China. Menurut penulis, konflik yang terjadi di Hong Kong akan sulit diprediksi penyelesaiannya karena eskalasi konflik yang semakin meningkat dan adanya campur tangan dari pihak-pihak eksternal yang terlibat dan adanya keinginan dari sebagian besar masyarakat Hong Kong untuk memisahkan diri dari China.

Hal yang menjadi penguat untuk berkembangnya suatu konflik yang terjadi di Hong Kong ini dapat dilihat dengan adanya aktor-aktor baru yang terlibat dalam konflik ini. Seperti bergabungnya China yang hadir dengan tujuan untuk mendukung Pemerintahan Hong Kong. Kembali pada bahasan sebelumnya, Tujuan dari bergabungnya China ini adalah ingin membantu Kepala Eksekutif Carrie Lam dalam mengakhiri kerusuhan yang sedang terjadi di Hong Kong dan mengembalikan ketertiban kondisi Hong Kong seperti dahulu (Sebayang, 2019b). Lalu juga bergabungnya Amerika Serikat yang memiliki latar belakang dalam mendukung kelompok Pro-Demokrasi dalam mencapai kebebasannya kembali lagi ke Hong Kong. Dengan adanya perubahan isu yang ada di Konflik *Anti-Extradition Law Amendment Bill* yang terjadi di Hong Kong ini nantinya juga akan mempengaruhi sebuah pemilihan terhadap strategi dan *style* yang digunakan untuk mencapai suatu kepentingan.

Strategi dan Taktik dalam Dinamika Konflik

Strategi berfungsi sebagai rencana keseluruhan yang berfungsi sebagai rencana keseluruhan untuk menanggapi situasi yang diberikan. Menurut Lulofs dan Cahn, Strategi dibuat untuk menekan lawan adalah sebuah taktik yang dapat dianggap sebagai tindakan spesifik untuk memicu pergerakan konflik antar aktor (Lulofs & Cahn, 2000).

Dengan melihat konflik *Anti-Extradition Law Amendment Bill* (ELAB) yang terjadi di Hong Kong diawali dengan damai yang menggunakan strategi dengan berupaya pada aksi demonstrasi, protes dan lain sebagainya (Mangkuto, 2019b). Namun seiring berjalannya waktu dan semakin keruhnya konflik yang terjadi ini menyebabkan konflik di Hong Kong

berubah menggunakan strategi yang lebih berfokus pada strategi kekerasan (Li, 2019). Hal ini terlihat ketika kelompok Pro-Democracy mulai menggunakan beberapa upaya untuk melawan kekuatan dari pihak kepolisian Hong Kong seperti menghancurkan jendela, menyalakan api dengan membakar sejumlah kardus yang ada di jalanan, dan merusak beberapa fasilitas yang ada di MTR Station Central Hong Kong (Sebayang, 2019a). Selain itu kelompok Pro-Demokrasi ini juga melakukan perusakan terhadap berbagai tempat yang ada di Central, seperti toko perhiasan, pusat perbelanjaan, hingga berbagai bank yang ada di Hong Kong. Aksi ini dilakukan dengan meletakan pecahan kaca dan batu bata (Sebayang, 2019a). Saat melakukan penyerangan terhadap kekuatan polisi, kelompok Pro-Demokrasi banyak menggunakan strategi dengan melempar batu, batu bata dan bom molotov, serta menggunakan tiang dan ketapel untuk bertarung. Selain itu juga terdapat penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Pro-demokrasi dengan melakukan pemukulan kepada seorang polisi yang sedang menggunakan pakaian preman, lalu kembali lagi melempar bom molotov secara singkat membakar pria tersebut (Harrison, Kuo, & Yu, 2019).

Dari situasi yang dilihat secara langsung dan dialami oleh penulis, Kelompok Pro-Demokrasi juga melakukan perusakan yang menarget MTR Sha Tin yang terhubung dengan mal, menghancurkan mesin tiket dan kamera keamanan. Adegan kehancuran serupa terjadi di stasiun MTR Kowloon, Nam Cheong, dan Kwai Fong.

Gambar 4. MTR Kowloon

Sumber: (Data Olahan Penulis)

Pada malam harinya tanggal 22 September 2019 kelompok pro-demokrasi kembali melakukan aksi protesnya dengan berkumpul kembali di luar Kantor polisi Mong Kong. Mereka juga meluncurkan beberapa peluru karet untuk ditembakkan ke arah kantor polisi Mong Kong (The Straits Times, 2019b). Selain itu, Bank Of China juga menjadi target penyerangan dari kelompok Pro-Demokrasi dengan menyemprotkan mural karena mereka menganggap bahwa Bank Of China merupakan bank pro-Beijing (Yu, 2019).

Gambar 5. China Constructions Bank (ASIA)

Sumber: (Data olahan penulis)

Target penyerangan yang dilakukan kelompok Pro-Demokrasi ini juga menitikkan kepada kafe *Starbucks* setelah seorang anggota keluarga dari rantai restoran lokal yang memiliki waralaba lokal berbicara menentang para demonstran dan menyebut sebagai "pengunjuk rasa radikal" (E. Wong, 2019). Juru kampanye demokrasi terkemuka Joshua Wong termasuk di antara mereka yang menyerukan boikot *Starbucks* sejak pidato Wu dan lebih dari 50.000 orang telah menandatangani petisi yang meminta perusahaan yang bermarkas di Seattle untuk memutuskan hubungan dengan *Maxim* (E. Wong, 2019).

Gambar 6. Starbucks Coffee

Sumber: (Data olahan penulis)

Starbucks dan *Yoshinoya* telah berulang kali menjadi sasaran dari kelompok Pro-Demokrasi karena pemilik waralaba Hong Kong, sementara *Activision Blizzard*, pembuat *World of Warcraft*, juga telah menjadi sasaran boikot karena mencoba menyensor pemain pro-demokrasi di Hong Kong (E. Wong, 2019).

Perubahan Style

Menurut Jeong, pemilihan dari *style* dapat dipengaruhi berdasarkan motivasi dan situasi konflik yang sedang terjadi. Pemilihan *style* ini dilakukan agar dapat menimbulkan sifat agresif yang cenderung dapat melihat suatu konflik (Jeong, 2008). Konflik yang terjadi di Hong Kong ini cenderung menggunakan *style* yang cenderung *Avoiding* yang dapat dilihat ketika kelompok Pro-Demokrasi melakukan cara yang menggunakan filosofi "*be water*" dari Bruce Lee. Filosofi ini memiliki makna yang mana kelompok Pro-Demokrasi ini melakukan sebuah pergerakan yang gesit sehingga polisi merasa lebih sulit untuk merespons.

Kelompok Pro-Demokrasi juga sering mundur ketika mereka sudah mengetahui jika pihak polisi akan segera datang dan mereka akan secepat mungkin untuk berpindah tempat dan akan muncul di tempat lain (Hui, 2019). Kelompok Pro-Demokrasi mampu melakukan berbagai cara agar suara mereka dalam melakukan penolak RUU Ekstradisi didengar dan dikabulkan. Lalu dengan seiring berjalannya waktu, perubahan *style* ini berubah menjadi *Contending* (Persaingan). Perubahan *style* ini berfokus pada upaya dalam memenangkan persaingan yang dilakukan oleh kelompok Pro-Demokrasi yang dilihat dengan adanya penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Pro-Demokrasi secara terus menerus sehingga mengarah pada win-lose pada situasi konflik yang terjadi di Hong Kong. Perubahan gaya ini terjadi ketika Kepala Eksekutif Carrie Lam tidak memberikan respons terhadap aspirasi yang diserukan oleh kelompok Pro-Demokrasi. Selain itu perubahan *style* ini terlihat semakin kuat ketika banyak para analis memberikan pernyataan bahwa tidak mudah bagi Hong Kong untuk lepas dari tekanan China (Sebayang, 2019e). Kelompok Pro-Demokrasi mendapatkan dukungan dan bantuan dari aktor eksternal yaitu Amerika Serikat dan organisasi Civil Human Right Front. Karena hal tersebut memunculkan perlawanan senjata yang dilakukan oleh kelompok Pro-Demokrasi.

KESIMPULAN

Dari penelitian di atas penulis menemukan bahwa konflik *Anti-Extradition Law Amendment Bill* (ELAB) yang terjadi di Hong Kong mengikuti proses dinamika konflik yang dibuat oleh Ho-Won Jeong. Proses perubahan secara internal terjadi berawal dari adanya kelompok Pro-Demokrasi yang berdiri sebagai kelompok pemberontak. Kelompok ini didominasi oleh kalangan pemuda yang tidak percaya dengan pemerintah. Berbagai upaya juga mereka lakukan seperti penggalangan dana untuk memasukkan iklan di surat kabar internasional serta memanfaatkan fitur *AirDrop* untuk memperluas penyebaran informasi untuk mendukung aksi mereka. Dari kegiatan yang kelompok ini lakukan, interaksi antar aktor internal pun terbentuk. Berbagai cara telah dilakukan, cara kekerasan pun mereka lalui untuk mencapai tujuan mereka. Hal tersebut akhirnya menimbulkan gesekan yang berujung pada konflik yang berkepanjangan dan meluas.

Keterlibatan beberapa pihak pada level internal juga menjadi bagian dari dinamika konflik yang terjadi. Bergabungnya organisasi Civil Human Right Front menjadi bagian dari para demonstran bertujuan untuk memastikan aksi protes tetap berjalan dengan sah dan tertib. Konflik yang terjadi di Hong Kong tidak semata-mata terjadi karena adanya pengaruh secara internal namun juga secara eksternal. Dari sisi eksternal, masyarakat Hong Kong mendapat dukungan dari pemerintah Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Donald Trump. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan meningkatnya isu perang dagang antara Amerika dan China, yang kemudian akan mempengaruhi perekonomian di Hong Kong. Dukungan yang diberikan Amerika kepada demonstran ditunjukkan pula dengan penandatanganan Undang – Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi yang mengisyaratkan tinjauan tahunan terhadap status Hong Kong dengan Amerika.

Kemudian, adanya penambahan aktor juga memberikan pengaruh terhadap dinamika konflik yang terjadi. Joshua Wong berencana untuk menuntut demokrasi di Hong Kong dengan melakukan perjalanan ke Amerika untuk ikut serta dalam Komite Kongres untuk melakukan dengar pendapat tentang China dan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dan demokrasi di Hong Kong. Namun, rencana tersebut telah diketahui oleh pihak kepolisian yang menyebabkan Wong ditangkap. Keterlibatan presiden Xi Jinping yang berasal dari Mainland China juga mempengaruhi dinamika yang terjadi. Hal tersebut karena Presiden Xi Jinping memberikan dukungan penuh terhadap Carrie Lam dan terus mendukung pemerintah Hong Kong secara penuh.

Dalam aksi ini, juga terjadi perubahan tujuan. Yang mana pada awalnya aksi ini berasal dari penangkapan Lam Wing Kee, seorang pedagang buku yang telah menjual buku yang mengkritik pemerintah China pada tahun 2015 dan penangkapan itu dinilai sewenang-wenang. Selanjutnya, terjadi aksi pembunuhan pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Chan terhadap kekasihnya di Hong Kong. Namun, kemudian pemerintah Hong Kong menggunakan permintaan Taiwan agar Chan dapat diekstradisi sebagai alasan untuk mengajukan RUU yang kontroversial yang ditolak sebagian besar masyarakat Hong Kong.

Melihat konflik yang terjadi di Hong Kong terdapat perbedaan nilai antara China dan Hong Kong, yang mana China menerapkan sistem sosialis dan Hong Kong kapitalis. Perbedaan nilai yang dianut juga menjadi penyebab terjadinya Revolusi Payung. Pengesahan RUU Ekstradisi juga mengakibatkan Hong Kong kembali jatuh di tangan China karena ketidakstabilan ekonomi yang dialami. Lalu juga terdapat perubahan kepentingan yang ditujukan oleh kelompok Pro-Demokrasi yang berawal dari kepentingan penegakan Hak Asasi dari Hong Kong sendiri dan akhirnya membuat sebagian besar kelompok Pro-Demokrasi turun ke jalan untuk melakukan aksi dalam menyampaikan aspirasi mereka dan kemudian mengalami perubahan kepentingan yang dituntut oleh kelompok Pro-Demokrasi dengan memberikan tuntutan untuk melakukan penggulingan masa Pemerintahan Carrie Lam yang dianggap telah mengecewakan masyarakat Hong Kong.

Perkembangan isu yang dilakukan oleh kelompok Pro-Demokrasi juga mengakibatkan masifnya demonstrasi yang dilakukan untuk menentang RUU Ekstradisi. Berbagai macam strategi juga dilakukan karena semakin keruhnya konflik yang terjadi. Berawal dari demonstrasi yang tertib menjadi demonstrasi yang berfokus pada strategi kekerasan agar suara mereka semakin didengar. Tidak hanya itu, ketika kelompok demonstran mulai dipukul mundur oleh polisi, mereka akan berpindah ke tempat lain yang mengakibatkan konflik terjadi secara terus menerus.

Penulis kemudian menyimpulkan bahwa proses dinamika konflik *Anti-Extradition Law Amendment Bill* (ELAB) yang dilakukan di Hong Kong pada tahun 2019, melalui 3 tahap yaitu pengaruh internal, pengaruh eksternal dan kompleksitas yang terjadi antara 2 aktor. Hal ini juga sesuai dengan argumen utama yang penulis buat sebelumnya yang menyebutkan bahwa adanya keterlibatan aktor lain secara internal, dan eksternal yang menjadi pihak ketiga yang ikut serta dalam konflik ini. Kemudian juga terdapat kompleksitas yang terjadi antara dua aktor dalam keberlangsungan konflik. Dinamika tersebut juga yang akhirnya mengakibatkan cepatnya eskalasi yang terjadi di dalam demonstrasi penolakan RUU Ekstradisi di Hong Kong.

DAFTAR PUSTAKA

- Agencies. (2019). Clashes between officers and protesters outside Hong Kong police station. Retrieved March 15, 2020, from Channel News Asia website: <https://www.channelnewsasia.com/news/asia/hongkong-protesters-clash-outside-police-station-11767302>
- Albert, E., & Xu, B. (2019). The Chinese Communist Party. Retrieved February 21, 2020, from Council on Foreign Relations website: <https://www.cfr.org/background/chinese-communist-party>
- AP News. (2019). Latest: Trump: Trade war makes China cautious in Hong Kong. Retrieved February 24, 2020, from AP News website: <https://apnews.com/7363616fa37f457bb57c3da4731b5b42>
- Asher, S., & Tsoi, G. (2019). What led to a single gunshot being fired? Retrieved September 29, 2019, from BBC News website:

- <https://www.bbc.co.uk/news/extra/1diisEsIvY/hong-kong-protests>
- Bartos, O. J., & Wehr, P. (2002). *Using Conflict Theory*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511613692>
- BBC News. (2019a). Hong Kong: Petrol bombs tossed at police in latest protest. Retrieved April 3, 2020, from BBC News website: <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50115629>
- BBC News. (2019b). Hong Kong march: Thousands join largest pro-democracy rally in months. Retrieved February 15, 2020, from BBC News website: <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50704137>
- BBC News. (2019c). Hong Kong protest: “Nearly two million” join demonstration. Retrieved February 26, 2020, from BBC News website: <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-48656471>
- BBC News. (2019d). Hong Kong protest: student boycott class on first day back. Retrieved March 11, 2020, from BBC News website: <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49548089>
- BBC News. (2019e). Hong Kong protests cripple airport for second day. Retrieved March 17, 2020, from BBC News website: <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49330848>
- BBC News. (2019f). Unjuk rasa Hong Kong: lima hal yang perlu anda ketahui tentang protes menentang RUU Ekstradisi ke China. Retrieved March 22, 2020, from BBC News website: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-48577627>
- Boland, R. (2019). What Country is Hong Kong Actually in? Retrieved February 21, 2020, from Tripsavvy website: <https://www.tripsavvy.com/what-country-is-hong-kong-in-1535874>
- Chan, H. (2019). In Pictures: 12,000 Hongkongers march in protest against ‘evil’ China extradition law, organisers say. Retrieved September 10, 2019, from Hongkong Free Press website: <https://www.hongkongfp.com/2019/03/31/pictures-12000-hongkongers-march-protest-evil-china-extradition-law-organisers-say/>
- Cheng, K. (2019a). Beijing fully supports Hong Kong leader Carrie Lam’s proposed plan of action, says china leader Xi Jinping-state media. Retrieved February 21, 2020, from Hongkong Free Press website: <https://www.hongkongfp.com/2019/12/20/beijing-fully-supports-hong-kong-leader-carrie-lams-proposed-plan-action-says-china-leader-xi-jinping-state-media/>
- Cheng, K. (2019b). Calls for general strike and 7 rallies across Hong Kong on Monday, as protests escalate. Retrieved March 24, 2020, from Hongkong Free Press website: <https://www.hongkongfp.com/2019/08/02/calls-general-strike-7-rallies-across-hong-kong-monday-protests-escalate/>
- Cheng, K. (2019c). Explainer: How frontline protesters’ toolkit has evolved over Hong Kong’s long summer of dissent. Retrieved March 10, 2020, from Hongkong Free Press website: <https://www.hongkongfp.com/2019/08/09/explainer-frontline-protesters-toolkit-evolved-hong-kongs-long-summer-dissent/>
- Cheng, K. (2019d). Hong Kong running group must seek police permission if participants exceed 30, warn police. Retrieved March 10, 2020, from Hongkong Free Press website: <https://www.hongkongfp.com/2019/10/29/hong-kong-running-group-must-seek-police-permission-participants-exceed-30-warn-police/>
- Cheng, K., & Chan, H. (2019). In pictures: “lennon Wall” message boards appears across Hong Kong districts in support of anti-extradition bill protests. Retrieved March 10, 2020, from Hongkong Free Press website: <https://www.hongkongfp.com/2019/07/09/pictures-lennon-wall-message-boards->

- appear-across-hong-kong-districts-support-anti-extradition-law-protesters/
 Cheung, H., & Hughes, R. (2019). Why are there protests in Hong Kong? All the context you need. Retrieved September 21, 2019, from BBC News website: <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-48607723/>
- CNN Indonesia. (2019a). Carrie Lam Ingatkan AS Tak Campuri Masalah Hong Kong. Retrieved February 20, 2020, from CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190910133042-113-429101/carrie-lam-ingatkan-as-tak-campuri-masalah-hong-kong>
- CNN Indonesia. (2019b). Di Balik protes RUU Ekstradisi, Aksi Terbesar Hong Kong. Retrieved February 21, 2020, from CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190610143415-113-402105/di-balik-protes-ruu-ekstradisi-aksi-terbesar-hong-kong>
- da Costa, A. N. (2019). Will the Us's Hong Kong right law derail trade talks? Retrieved February 17, 2020, from BBC News website: <https://www.bbc.com/news/business-50582881>
- Grundy, T. (2019). In pictures: tear gas in Causeway Bay as Hong Kong protesters convene for unauthorised march. Retrieved March 11, 2020, from Hongkong Free Press website: <https://www.hongkongfp.com/2019/09/29/breaking-tear-gas-causeway-bay-hong-kong-protesters-convene-anti-authoritarianism-march/>
- Harrison, E. G., Kuo, L., & Yu, V. (2019). A battle for the soul of the city: why violence has spiralled in the Hong Kong protests. Retrieved February 22, 2020, from The Guardian website: <https://www.theguardian.com/world/2019/oct/06/a-battle-for-the-soul-of-the-city-why-violence-has-spiralled-in-the-hong-kong-protests>
- Huang, C. (2019). Hong Kong police fire tear gas at protesters in Tsim Sha Tsui: city braces itself for Monday strike. Retrieved March 12, 2020, from The Straits Times website: <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/hong-kong-protests-planned-rally-in-mongkok-gets-green-light-more-marches-ahead>
- Hui, M. (2019). Bruce's Lee "be water" philosophy works for Hong Kong protests- can it work for trail runners? Retrieved February 22, 2020, from Sunday China Morning Post website: <https://www.scmp.com/sport/outdoor/trail-running/article/3024649/bruce-lees-be-water-philosophy-works-hong-kong-protests>
- Ives, M. (2019). What is Hong Kong's Extradition Bill? Retrieved March 12, 2020, from New York Times website: <https://www.nytimes.com/2019/06/10/world/asia/hong-kong-extradition-bill.html>
- Jeong, H.-W. (2008). *Understanding Conflict and Conflict Analysis*. London: SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446279366>
- Kuo, L. (2019). Hong Kong: protesters wary over elite troops clearing roadblocks. Retrieved February 20, 2020, from The Guardian website: <https://www.theguardian.com/world/2019/nov/18/hong-kong-protesters-wary-over-elite-troops-clearing-roadblocks>
- Lee, Y. N. (2019). 5 charts show how protests in Hong Kong have affected the city's economy and stock market. Retrieved February 23, 2020, from CNBC website: <https://www.cnbc.com/2019/12/26/hong-kong-protests-impact-on-economy-stock-market-in-five-charts.html>
- Leung, C. (2019). Extradition bill not made to measure for mainland China and won't be abandoned, Hong Kong leader Carrie Lam says. Retrieved September 20, 2019, from Sunday China Morning Post website: [scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3004067/extradition-bill-not-made-measure-mainland-china-and-wont/](https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3004067/extradition-bill-not-made-measure-mainland-china-and-wont)

- Leung, C., & Chiu, P. (2019). Baptist University president call on Hong Kong police to treat student fairly after arrest over possession of laser pens triggers siege of Sham Shui Po Police Station. Retrieved March 17, 2020, from Sunday China Morning Post website: <https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3021716/tear-gas-fired-sham-shui-po-hong-kong-after-students>
- Li, J. (2019). Hong Kong-China extradition plans explained. Retrieved March 13, 2020, from BBC News website: <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-47810723>
- Lok-Kei, S. (2019). Civil Human Right Front vows to keep the peace at Hong Kong pro-democracy march, with police-protester diplomacy. Retrieved February 15, 2020, from Sunday China Morning Post website: <https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3041001/civil-human-rights-front-vows-keep-peace-hong-kong-pro>
- Lok-Kei, S., & Kang-chung, N. (2019). Estimated 130,000 protesters join march against proposed extradition law that will allow transfer of fugitives from Hong Kong to mainland China. Retrieved from Sunday China Morning Post website: <https://www.scmp.com/news/hongkong/politics/article/3007999/%0Athousands-set-join-protest-march-against-proposed%0A>
- Lulofs, R. S., & Cahn, D. D. (2000). *Conflict : From Theory to Action* (2nd ed.). Boston: Allyn and Bacon.
- Mangkuto, W. S. (2019a). Protes berlanjut, Hong Kong luncurkan bantuan Ekonomi Rp 35 T.
- Mangkuto, W. S. (2019b). RUU Ekstradisi sudah dicabut, kenapa demo Hong Kong masih lanjut? Retrieved February 23, 2020, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190907202728-4-97838/ruu-ekstradisi-sudah-dicabut-kenapa-demo-hong-kong-lanjut>
- Mangkuto, W. S. (2019c). Sengsara karena demo, Hong Kong seminggu rugi Rp 5 T. Retrieved February 23, 2020, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191009114641-4-105541/sengsara-karena-demo-hong-kong-seminggu-rugi-rp-5-t>
- Moleong, L. J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ng, K. (2019). Hong Kong protest: Carrie Lam has failed to govern and should resign. Pemerintah.Net. (2014). Bentuk Pemerintahan Republik. Retrieved February 21, 2020, from Pemerintah.Net website: <https://www.cfr.org/background/chinese-communist-party>
- Regan, H., Berlinger, J., George, S., & Yeung, J. (2019). Hong Kong protest enter 11 th consecutive weekend. Retrieved March 17, 2020, from CNN website: <https://edition.cnn.com/asia/live-news/hong-kong-protest-aug-18-intl-hnk/index.html>
- Regan, H., Berlinger, J., Yeung, J., & Westcott, B. (2019). City-wide strikes bring Hong Kong to standstill. Retrieved March 12, 2020, from CNN website: <https://edition.cnn.com/2019/08/05/asia/hong-kong-strike-august-5-intl-hnk/index.html>
- Sebayang, R. (2019a). Awas, demo Hong Kong makin tak terkendali. Retrieved December 8, 2019, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190909070437-4-97914/awas-demo-hong-kong-makin-tak-terkendali>
- Sebayang, R. (2019b). China : Tindakan lebih tegas diperlakukan di Hong Kong. Retrieved March 3, 2020, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191113173150-4-115064/china-tindakan->

- lebih-tegas-diperlukan-di-hong-kong
- Sebayang, R. (2019c). Demo hingga gedung DPR Rusak, Ada apa dengan Hong Kong? Retrieved December 8, 2019, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190702151401-4-82170/demo-hingga-gedung-dpr-rusak-ada-apa-dengan-hong-kong>
- Sebayang, R. (2019d). Ini Joshua Wong & Agnes Chow, Milenial pimpin Demo Hong Kong. Retrieved February 21, 2020, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190830144322-4-95987/ini-joshua-wong-agnes-chow-milenial-pimpin-demo-hong-kong>
- Sebayang, R. (2019e). Pro-Demokrasi menang, mungkinkah Hong Kong bebas dari china. Retrieved March 11, 2020, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191126083307-4-117944/pro-demokrasi-menang-mungkinkah-hong-kong-bebas-dari-china>
- Siu, T. (2019). It doesn't matter if its's Christmas': Hong Kong pro-democracy activists keep up protests". Retrieved April 3, 2020, from CNBC website: <https://www.cnbc.com/2019/12/25/hong-kong-activists-keep-up-protests-on-christmas-day.html>
- Su, A., & Ho Kilpatrick, R. (2019). Hong Kong's "valiant" fighters let the "peaceful" steer rally. Retrieved March 16, 2020, from Los Angeles Times website: https://enewspaper.latimes.com/infinity/article_share.aspx?guid=218250dd-b565-48bd-a7b8-52a57b0a63f1
- Sui, C. (2019). The murder behind the Hong Kong protest: A case where no-one wants to kill. Retrieved February 21, 2020, from BBC News website: <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50148577>
- Taylor, J., & Xinqi, S. (2019). Hong Kong Protesters bring transport to a halt for a second day. Retrieved April 3, 2020, from Hongkong Free Press website: <https://www.hongkongfp.com/2019/11/12/hong-kong-protesters-bring-transport-halt-second-day/>
- The Straits Times. (2019a). China's Xi Jinping vows support for Hong Kong leader Carrie Lam during "most difficult" time. Retrieved February 21, 2020, from The Straits Times website: <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/chinese-premier-li-keqiang-says-hong-kong-not-yet-out-of-its-dilemma-in-meeting>
- The Straits Times. (2019b). HK protests: Clashes at upscale mall, MTR stations. Retrieved February 22, 2020, from The Straits Times website: <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/hk-protests-clashes-at-upscale-mall-mtr-stations>
- The Straits Times. (2019c). Protesters occupy roads, surround police station in Mong Kok after police foiled airport protest. Retrieved March 11, 2020, from The Straits Times website: <https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/hong-kong-protesters-aim-to-stress-test-airport>
- Vidya, A. (2019a). Pemimpin Hong Kong kembali peringatkan AS untuk Tidak ikut campur. Retrieved February 20, 2020, from Kompas website: <https://internasional.kompas.com/read/2019/09/10/15342821/pemimpin-hong-kong-kembali-peringatkan-as-untuk-tidak-ikut-campur?page=all>
- Vidya, A. (2019b). Unjuk Rasa Anti-UU Ekstradisi di Hong Kong, Satu Orang Tewas Terjatuh dari Atap Gedung. Retrieved December 8, 2019, from Republika Online website: <https://internasional.republika.co.id/berita/q0n3al366/mahasiswa-hong-kong-yang-jatuh-saat-protes-meninggal>
- Wong, E. (2019). Hong Kong Protesters are targeting starbucks. Apple Could be next.

- Retrieved March 3, 2020, from New York Times website:
<https://www.nytimes.com/2019/10/15/business/hong-kong-starbucks-vandalism.html>
- Wong, M. (2019). Thanks, Yanks, but no Thanks: why US intervention in Hong Kong's crisis may be more than protesters bargained for. Retrieved February 20, 2020, from Hongkong Free Press website: <https://www.hongkongfp.com/2019/09/08/thanks-yanks-no-thanks-us-intervention-hong-kongs-crisis-may-protesters-bargained>
- Wong, T.-K. (2019). Hong Kong protest: What are the 'five demands'? What do protesters want? Retrieved March 26, 2020, from Young Post SCMP website:
<https://yp.scmp.com/hongkongprotests5demands>
- Yiu-man, L. L. (2019). Hong Kong's Protesters Are Resisting China With Anarchy and Principle. Retrieved September 29, 2019, from The New York Times website:
<https://www.nytimes.com/2019/06/28/opinion/hong-kong-protests-extradition-china.html>
- Yu, V. (2019). Hong Kong: mammoth rally marks six months of pro-democracy protests. Retrieved March 3, 2020, from The Guardian website:
<https://www.theguardian.com/world/2019/dec/08/hong-kong-democracy-protests-continue-into-seventh-month>
- Zheng, S. (2019). Hong Kong airport protest continues for third day, reinforcements set to join demonstrators who camped overnight. Retrieved March 12, 2020, from Sunday China Morning Post website: <https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3022308/hong-kong-airport-protest-continues-third-day>
- Zhou, V., & Wong, A. (2019). Be water: the Bruce Lee philosophy behind Hong Kong's protests. Retrieved March 10, 2020, from Inkstone website:
www.inkstonenews.com/politics/hong-kong-protesters-get-inspirations-bruce-lee-kung-fu-strategy/article/3021622